KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembentukan Ditjen pesantren, DPR yakin segera terealisasi
Tanggal : Sabtu, 31 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pembentukan Ditjen Pesantren

DPR Yakin Segera Terealisasi

Senayan mendorong agar pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag) segera direalisasikan.

FB PRIBADI

Hidayat Nur Wahid

ANGGOTA Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengaku menerima banyak aspirasi dari para kiai, pimpinan pesantren, hingga tokoh masyarakat yang berharap kehadiran Ditjen Pesantren. Harapannya, lembaga itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan di lingkungan pesantren.

Berdasarkan informasi dari Menteri Agama (Menag), kata Hidayat, secara administrasi pembentukan Ditjen Pesantren sudah selesai dan kini menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Harapannya agar Perpres pembentukan Ditjen Pesantren itu segera terbit dan dapat segera diresmikan.

Presiden Prabowo, lanjutnya , telah menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren. Bahkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengeluarkan surat instruksi pendirian Ditjen Pesantren kepada Kemenag sejak 21 Oktober 2025. Tentunya kalangan pesantren, menyambut antusias terbitnya surat instruksi tersebut.

Tapi hingga tiga bulan berselang, ternyata Ditjen Pesantren belum juga terbentuk. "Kami (Komisi VIII DPR) akan terus mengawal agar pembentukan Ditjen Pesantren bisa dipercepat," tandas politikus senior PKS ini.

Nantinya bila Ditjen Pesantren terbentuk, ia mengusulkan salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi Dana Abadi Pesantren. Juga pemisahan Dana Abadi Pesantren dari Dana Abadi Pendidikan. Hal ini telah dilakukan pada Dana Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Penelitian, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting agar Dana Abadi Pesantren dapat dikelola secara lebih maksimal dan memberikan manfaat langsung bagi pesantren dan para santri. Harapannya bisa meningkatkan kualitas mereka, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Terlebih saat ini perkembangan pesantren sangat pesat sejak disahkannya Undang-Undang Pesantren. Buktinya, terdapat 341.565 lembaga dalam ekosistem pesantren, lebih dari 12,6 juta santri. "Juga lebih dari 2 juta ustaz dan tenaga pendidik yang tersebar di seluruh Indonesia," sebut wakil ketua MPR ini.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menambahkan, kebutuhan anggaran untuk Ditjen Pesantren diusulkan sebesar lebih dari Rp 12 triliun. Jika digabungkan, total anggaran Kemenag diprediksi bisa menembus angka Rp 129 triliun. "Apakah perangkat Kemenag dari pusat sampai daerah sudah siap mengelola tanggung jawab sebesar itu?" tanyanya.

Selly mengingatkan, pembentukan Ditjen Pesantren jangan sampai hanya berhenti pada pembagian kursi jabatan atau angka di atas kertas. Karena selama ini banyak persoalan nyata di lapangan, mulai dari infrastruktur pesantren yang roboh hingga kerentanan terhadap bencana.

Selly menekankan, persoalan pesantren tidak bisa diselesaikan oleh Kemenag sendirian. Ditjen Pesantren nantinya menjadi simpul koordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk fisik bangunan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk legalitas tanah, hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Tantangan pesantren hari ini membutuhkan kolaborasi agar fungsi keagamaan negara benar-benar hadir secara utuh," imbuh politikus PDIP ini.

Sementara, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii mengatakan, Ditjen Pesantren merupakan kebutuhan mendesak yang telah digagas sejak 2019. Selama ini Ditjen Pesantren berada di bawah Direktorat Pendidikan Islam di Kemenag.

Menurutnya, pembentukan administrasi ditjen itu telah diserahkan ke Kemensetneg dan menunggu persetujuan final dari Presiden Prabowo. "Kalau Presiden tanda tangani, resmilah satu dirjen baru di Kemenag namanya Ditjen Pesantren," ujar Syafi'i di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Syafi'i menuturkan, selama di bawah Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Pesantren hanya memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Anggaran itu terlalu kecil karena harus mengelola ribuan lembaga. "Kami mengelola 43 ribu pesantren, 11 juta santri, dan 1,7 juta kiai," pungkasnya. ■ TIF